



FUTUROLOGY OF ISLAMIC EDUCATION IN IDEOLOGICAL, SECULAR AND PANCASILA STATE

ATMARI

(Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel
dan Dosen di STAI al Azhar Surabaya)

ABSTRACT

Indonesia is not Islamic State, but also not secular state. Indonesian people always state that they are own private ideology; in term Pancasila state. Therefore, the concept of Islamic education ought to be manifested with Pancasila ideology, not Islamic or Secular Education. But, Pancasila itself cannot be implemented well until now. This paper will try to trace, conclude, and analyze the main format of Islamic education in Ideological state such as Pakistan and Iran, and also in secular State seem like in United State and United Kingdom trough anthropological and technological approach.

Iran and Pakistan are represented as example of state which is Islamic education became the dominant rule of their society. Almost all of their people educated with Islamic education system. Besides that, in the western country, make a secular system for their education based on their ideology as secular state. Anthropologically, both state, Islamic and Western State had same aims and ideology in their country; Islam in Iran and Secularism in United State.

Like mention above, the approach or methodology of this paper research is anthropological and technological method. Study of anthropology will be used in historical concept in both state. At the same time, technological approach will explain the practice or future concept for Islamic Education in Indonesia.

In the end, this paper also will give an ideal concept and example for Islamic Education in Indonesia based on its Pancasila ideology. Pancasila extent above Islam and Secular concept. Pancasila become a technological education concept for Islamic education. So, in the future, Islamic education in Indonesia does not tend to western concept or Islamic concept, but it tends to the philosophy of Pancasila.

PROLOG

Islam, sebagai sebuah agama, memang memiliki cerita yang unik, berbeda dengan beberapa agama terdahulunya. Islam, tampaknya, tidak hanya diterima dari

aspek ajarannya saja, melainkan juga merangsek masuk ke ranah politik sehingga diyakini mampu menyelesaikan problematika yang dialami suatu negara tertentu. Dikala Islam menjadi sistem politik, secara otomatis, Islam akan direposisi tidak berada pada *sacred quality*-nya. Islam akan rentan terhadap kritik dan tuduhan tertentu.

Salah satu nilai keunikan agama Islam, selain menjadi sistem politik kenegaraan, Islam juga memiliki sistem pendidikannya sendiri. Dalam kajian kesejarahan, pendidikan Islam berkembang atau mengalami perubahan dari masa ke masa berkesesuaian dengan kebutuhan dan konteks zaman. Mulai dari sistem *majelis* di serambi masjid (*suffah*) di masa Nabi Muhammad, hingga sampai pada sistem pengasramaan, madrasah, di zaman Nizam al-Mulk³⁶⁸ dan terus berkembang hingga saat ini. Di dalam perjalanannya, secara antropologis (baca : pengejawantahan pendidikan Islam yang tampil kepermukaan) terdapat beberapa konsep-konsep yang berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial-politik yang ada di suatu negara tertentu. Di Turki misalnya, pada zaman At-Tatruck, yang menganut agama sekuler, pendidikan berbasis Islam dilarang karena sistem kenegaraan yang dianutnya adalah sistem secular (yakni pemisahan agama dan negara)³⁶⁹. Sedangkan di negara-negara yang masih berada dibawah kekuasaan sistem politik Islam pendidikan Islam masih menjadi *rule model* pendidikan di negara tersebut³⁷⁰. Adapula pendidikan Islam yang memilih berelaborasi dengan sistem pendidikan modern atau Barat, seperti yang terjadi di Aligarh India³⁷¹.

³⁶⁸ Madrasah merupakan *rule model* pendidikan Islam pertama yang didalamnya sudah menerapkan sistem kurikulum, sistem kelas, dan pengasramaan. Dari segi politik pendidikan madrasah lahir untuk membentengi kelompok Sunni dari faham Mu'tazilah yang mulai merebak di kalangan masyarakat. Nizam al-Mulk yang merupakan seorang sultan, maka dia menciptakan madrasah yang mengisolasi masyarakatnya dari faham-faham selain Asy

Arisme. Lihat : Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999), 160.

³⁶⁹ Pada masa awal Turki berada dibawah kekuasaan kekhalifahan atau kerajaan Turki mulai 1300-1923. Aturan yang dilaksanakan adalah Hukum Islam, yang dianggap tidak memberikan hak yang sama bagi non-muslim. Para otoritas kekuasaan memiliki hak penuh untuk mengatur sekolah dan sistem hukum yang ada. Lihat : Halen Rose Ebough, *The Ghulen Movement; a Sociological Analisis of civic movement rooted in moderate Islam* (New York : Springer, 2010), 13-14. Namun pada masa Mustafa Kemal Pasya yang kemudian dikenal dengan Attaturk. Dia mencipta Turki Modern sehingga diberi gelar Attaturk (bapak Turki). Pada tanggal 11 agustus 1923 Mustafa Kemal menjadi Presiden dan Fethi sebagai perdana menteri. Dengan ini negara baru turki berdiri tidak atas dasar dinasti, kerajaan, maupun agama melainkan dengan jargon; Westernisme, sekularisme, dan Nasionalisme, dengan ibu kota ditengah-tengah Turki yakni Ankara. Lihat : Syafiq A, Mughni, *Sejarah kebudayaan Islam Di Turki*, (Jakarta : Logos, 1997), 142

³⁷⁰ A. K. Brochi, Education in Ideological State dalam Naquib al-Attas, *Aims and Objective of Islamic Education* (Jeddah : King Abdul Aziz University Press, 1979), 63

³⁷¹ Di India umat Islam mengalami kekalahan perang melawan imperium Inggris. Pasca kekalahan tersebut, pemerintah India pun melakukan gerakan-gerakan impresif melawan sisa-sisa kekuatan umat Islam. Namun, tidak semua umat Islam yang melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata. Ada pula gerakan yang menfokuskan pada aspek dunia pendidikan. Yakni bernama Aligarh Movement. Gerakan ini dimotori oleh Sayyid Akhmad Khan dan kemudian dilanjutkan oleh pengikutnya. Goal gerakan ini adalah mendidik umat Islam dan berusaha untuk berelaborasi dengan kekuasaan Inggris

Penjelasan di atas, memberikan gambaran bahwa pendidikan Islam saat ini bergantung pada sistem ketatanegaraan dan belum ada format utuh mengenai sistem pendidikan Islam secara resmi. Menurut Naquib al-Attas, pendidikan Islam seyogyanya menjadi pembeda dari sistem pendidikan modern di negara-negara secular. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membangun etika Islami, bukan hanya pengetahuan kognitif belaka yang mengakibatkan anak memiliki kegersangan pada aspek spiritualitas³⁷². Hadi Sharifi, seorang professor dari Iran, juga menegaskan pendidikan Islam adalah lawan dari filsafat pendidikan modern. Baginya, pendidikan modern yang dikembangkan negara Barat, sangat lemah dan mudah dikritisi. Pendidikan Islam mesti memiliki coraknya sendiri sesuai dengan peranan agama Islam yang universal³⁷³.

Membincangkan sebuah sistem kenegaraan secara global, yang paling menonjol akhir-akhir ini adalah, sistem politik Islam dan Secular. Sistem pemerintahan Islam menginginkan aturan-aturan agama dikembangkan sebagai aturan baku suatu negara. Sedangkan secular adalah sebuah sistem yang ingin memisahkan peranan agama dan negara sendiri. Agama akan berada pada aspek privat individu manusia, pada ranah public agama tidak bisa diajarkan dan dijadikan aturan. Dengan demikian, sistem pendidikan di negara secular akan mengenyampingkan nilai-nilai keagamaan tertentu. Pendidikan hanya sebatas *transfer of science* belaka tanpa nilai-nilai keagamaan.

Dari dua sistem kenegaraan ataupun bahkan pendidikan (sekuler dan Islam) di atas sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pendidikan model secular adalah kekuatan ada pada nilai-nilai kemanusiaan yang dilanggengkan sendiri oleh manusia, dan disepakati oleh manusia (*humanism*), tanpa ada campur tangan nilai-nilai ketuhanan. Sistem negara secular berawal dari kesejarahan kelam negara Barat oleh penyelewengan kekuasaan Gereja di Abad Pertengahan. Oleh sebab itulah, para filosof menganggap bahwa agama akan menjadi penghambat dari kemajuan sebuah negara. Ada beberapa sosok yang berperan dalam mengusulkan sistem negara secular, semisal Martin Luther King, Machiavelli, dan lain sebagainya, hingga menghasilkan era baru bernama modernism. Sedangkan kelebihan dari sistem pendidikan Islam adalah berada pada nilai-nilai spiritualitas dan kematangan diri sebagai makhluk Tuhan yang tujuan utama kehidupannya adalah menyembah kepada Tuhan. Pendidikan Islam tidak hanya mengedepankan pada aspek duniawi melainkan *ukhrawi*.

Di sisi lain, pendidikan modern dan Islam saat ini juga dianggap memiliki kekurangan. Kekurangan pendidikan modern adalah pada aspek pembentukan etika peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Kebebasan yang

dimasa itu. Nawab Mohsin-ul-Mulk (ed.), *Addresses and Speeches Relating to the Muhammadan Anglo-Oriental College in Aligarh from its Foundation in 1875 to 1898* (Aligarh, Desember 1998), 31-32.

³⁷² Naquib al Attas, *Aims and Objectives of Islamic Education* (Jeddah : King Abdul Aziz University, 1979), 9

³⁷³ Hadi Sharifi, *The Islamic as Opposed to Modern Philosophy of Education* dalam Naquib al Attas, *Aims and Objectives of Islamic Education* (Jeddah : King Abdul Aziz University, 1979), 76

didengungkan malah memberikan dampak negative semisal tindakan-tindakan kriminal. Sistem pendidikan Islam pun demikian, ada banyak kasus-kasus yang menyudutkan pendidikan Islam pada titik nadzir. Misalnya kasus terorisme dan gerakan-gerakan separatis lainnya. Ada banyak hasil penelitian yang menyudutkan pendidikan Islam sebagai sumbu penyulut gerakan radikalisme global. Shiraz Thobroni mengungkapkan bahwa banyak ilmuan Barat menganggap bahwa pendidikan Islam sebagai salah satu sumbu penyulut aksi terorisme.³⁷⁴ Robert Hefner juga menganggap bahwa ada beberapa pendidikan Islam yang ditunggangi oleh gerakan-gerakan (*social movement*) tertentu, baik skala nasional maupun transnasional³⁷⁵. Sangkaan serupa juga disebutkan Greg Fealy dan Anthony Bubalo bahwa ada pendidikan Islam di Indoneisa khususnya, yang mengakomodasi kepentingan lain selain ideology negara Pancasila³⁷⁶.

Berawal dari kegelisahan yang cukup kompleks inilah, penulis menganggap bahwa perlu adanya sebuah konsep konfehensif yang dapat mengakomodasi pendidikan modern dan juga pendidikan Islam. Sehingga tidak terdapat lagi dikotomi kekuatan sekularisme ataupun Islamisme di Indonesia. Sekularisme jelas banyak dipengaruhi oleh logocentrisme yang digunakan oleh ilmuan Barat, sedangkan Islamisme atau Arabisme lebih banyak dipengaruhi oleh ilmuan muslim dari Timur Tengah. Dalam konteks Indonesia, perdebatan ini sebenarnya sudah selesai dibincangkan oleh para pendiri bangsa ini. Sistem negara Islam pernah ditawarkan oleh Natsir, Syahrir sedangkan disisi lain ada kelompok nasionalis yang diwakili oleh Soekarno sehingga mereka menemukan konsep akomodatif bernama Pancasila. Yakni sebuah negara yang berlandaskan ketuhanan (agamis) pada sila pertama dan tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*) pada sila kedua. Pancasila terlahir bukan dari keinginan transnasional, melainkan dari urat nadi kebudayaan Indonesia sendiri. Islam dan Barat adalah barang baru yang diperkenalkan melalui arus globalisasi.

Tapi, dalam konteks pendidikan Islam, eksklusifisme dan indoktrinasi keagamaan yang intoleran juga masih banyak terjadi. Kedepan, pendidikan Islam seyogyanya mampu ‘menanggalkan’ *truth claim* dan merubahnya menjadi *truth exchange*. Pasalnya, Islam bukan satu-satunya agama yang ada di Indonesia dan bukan merupakan ideology pembenar yang terlahir dari akar kebudayaan Indonesia. Jadi, pada akhirnya, tujuan tulisan ini adalah mengeksplorasi konsep pendidikan masa depan (*futureology*) berdasarkan pada nilai-nilai pancasila bukan Islamisme semata.

Untuk memudahkan memahami kerangka tulisan ini, penulis akan membaginya menjadi beberapa bagian. *Pertama*, konsep umum mengenai pendidikan Islam, mulai dari terminology dan perbedaannya dengan pendidikan modern, kelemahan dan

³⁷⁴ Shiraz Thobroni. *Islam in School Curriculum Symbolic and cultural claims*, (New York: Continuum International Publishing, 2010), 5-6

³⁷⁵ Robert W. Hefner edited, *The politic of multiculturalism*, (Honolulu ; University of Hawai'i Press, 2001), 12

³⁷⁶ Greg Fealy dan Anthony *Jejak Kafilah* terj. Akh. Muzaki (Bandung : Mizan, 2007), 9

kelebihan masing-masing konsep. *Kedua*, kajian antropologis tentang pendidikan Islam baik di Negara Sekuler maupun di negara Islam sendiri. *Ketiga*, futurology pendidikan Islam, yang berisikan tentang gagasan pendidikan Islam masa depan berdasarkan pada ideology Pancasila.

A. Islamic and western education concept ; general review

Khazanah pendidikan Islam, pada umumnya, mengenal tiga terminology pendidikan Islam. Hal itu merujuk pada term *al tarbiyah*, *al ta'lim*, dan *al ta'dib*. Dari ketiga term tersebut yang populer digunakan adalah istilah *tarbiyah*. Sedangkan *ta'dib* dan *ta'lim*, jarang sekali digunakan, walaupun kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam.³⁷⁷ Berikut ini adalah penjelasan secara proporsional tentang *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*.

Penggunaan istilah *tarbiyah* berasal dari kata *rabb*, yang berarti tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian dan eksistensinya.³⁷⁸ Penggunaan kata *tarbiyah* di dalam al Qur'an dengan berbagai kata yang serumpun dengannya diulang sebanyak 872 kali.³⁷⁹ Jika dilihat dari akar katanya dapat dilihat dari tiga bentuk, yaitu:

1. *Raba - yarbu - tarbiyah* (ربا - يربو - تربيه), yang memiliki makna bertambah dan berkembang.
2. *Rabiya - yarba- tarbiyah* (ربي - يربى - تربيه), yang memiliki makna tumbuh dan berkembang.
3. *Rabba - yarubbu - tarbiyah* (رب - يرب - تربيه), yang memiliki makna memperbaiki, menguasai, memelihara, merawat, memperindah, mengatur, dan menjaga kelestariannya.³⁸⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam yang dikandung dalam term *al tarbiyah* terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu: (a) memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa, (b) mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan, (c) mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan, (d) melaksanakan pendidikan secara bertahap.

Merujuk kepada leksikologis al Qur'an, penunjukan kata *tarbiyah*, yang merujuk kepada pengertian pendidikan secara eksplisit tidak ditemukan. Penunjukannya pada

³⁷⁷ Ahmad Syalabi, *Tarikh al Tarbiyah al Islamiyah* (Kairo: al Kashāf, 1954), 21.

³⁷⁸ Ibn Abdullah bin Ahmad al Ansari al Qurtubiy, *Tafsir al Qurtubiy* (Kairo: Dār al Shabīy, tt), 120.

³⁷⁹ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jogjakarta: Logos, 2000), 6. Lihat juga Rosidin, "Epistemologi Pendidikan dalam Al-Qur'an, Sumber, Objek & Metode Ilmu Pendidikan Islam" (Tesis—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 84. Rosidin menyebutkan kalau kata *tarbiyah* dan berbagai derivasinya disebutkan di dalam al Qur'an sebanyak 977 kali.

³⁸⁰ Abd. Rahman al Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam* (Jakarta: CV. Dipenogoro, 1992), 152.

pengertian pendidikan hanya dapat dilihat dari istilah lain yang seakar dengan kata *tarbiyah*, yang antara lain dapat dipahami dengan merujuk firman Allah dalam surat al Isra' ayat 24:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

Fahr al Razy, mengartikan term "*rabbayani*" sebagai bentuk pendidikan Islam dalam pengertian yang luas.³⁸¹ Demikian pula Sayyid Quthb, menafsirkan term tersebut sebagai upaya pemeliharaan jasmaniah peserta didik dan membantunya, mencapai kematangan mental, sebagai pancaran akhlak yang baik pada dirinya.³⁸² Jadi secara umum pendidikan Islam dalam term *tarbiyah* merujuk kepada konteks pendidikan yang menumbuhkan kembangkan potensi dan keprinadian peserta didik.

Penggunaan istilah *ta'lim* bersumber dari kata *'allama* yang berarti, pengajaran, yang bersifat pemberian, atau penyampaian pengetahuan/ keterampilan.³⁸³ Penyebutan term *ta'lim* dengan berbagai derivasinya di dalam al Qur'an adalah sebanyak 840 kali.³⁸⁴ Kata *ta'lim* menurut tinjauan bahasanya mempunyai asal kata dasar makna sebagai berikut:

1. Berasal dari kata dasar *'allama – yu'allimu*, yang berarti mengajarkan, mengcap, atau memberi tanda.
2. Berasal dari kata *'alima – ya'lamu*, yang berarti mengerti dan mengetahui.³⁸⁵

Berdasarkan makna di atas dapat disimpulkan bahwa makna istilah *ta'lim* mempunyai pengertian "usaha untuk menjadikan seseorang mengenal tanda-tanda, membedakan sesuatu dari yang lainnya, dan mempunyai pemahaman yang benar tentang sesuatu". Kata *ta'lim* mempunyai konotasi khusus kepada kata ilmu, sehingga konsep *ta'lim* itu mempunyai pengertian mengajarkan seseorang menjadi berilmu.

Pengertian tersebut dapat dilihat sebagaimana firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 31 dan ayat 151:

³⁸¹ Fahr al Razy, *Tafsir Fahr al Razy* (Teheran, Dār Kutub al Islamiyah, tt), 191.

³⁸² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zilal al Qur'an* (Beirut: Dār al Ahyat, tt), 15.

³⁸³ Ibn Mansur, *Lisān al Arab* (Kairo, Dār al Misriyah, 1992), 98.

³⁸⁴ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, 6. Lihat juga Rosidin, "Epistemologi Pendidikan dalam Al-Qur'an, Sumber, Objek & Metode Ilmu Pendidikan Islam", 102. Rosidin menyebutkan kalau kata *ta'lim* dan berbagai derivasinya disebutkan di dalam al Qur'an sebanyak 977 kali.

³⁸⁵ Abd. Rahman Abdullah, *Aktualisasi Konsep Dasar Pendidikan Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2000), 29.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.

Bila dilihat dari batasan pengertian yang ditawarkan dari kata *ta'lim* pada ayat di atas, terlihat pengertian pendidikan yang terlalu sempit pengertiannya. Hanya terbatas kepada proses transformasi keilmuan. Oleh karenanya pengertian *ta'lim* lebih mengarah kepada upaya optimalisasi aspek kognitif peserta didik melalui pengajaran.

Adapun kata *ta'dib* secara bahasa merupakan *masdar* dari kata "*addaba*", yang mempunyai makna dasar sebagai berikut:

1. *Ta'dib* berasal dsari kata dasar *aduba* – *ya'dubu*, yang berarti melatih, mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan.
2. *Ta'dib* berasal dari kata *aduba* – *ya'dibu*, yang berarti mengadakan pesta perjamuan dan berperilaku sopan.

Adapun mengenai kata *ta'dib*, tidak dijumpai penyebutan term tersebut dalam al-Qur'an. Kata tersebut dijumpai di dalam hadis. Naquib al Attas berpendapat bahwa kata yang paling tepat untuk mewakili aspek pendidikan dalam Islam adalah *ta'dib*. Karena menurutnya kata *tarbiyah*, memiliki cakupan yang terlampau luas. Melalui makna *ta'dib* maka pendidikan Islam berisikan tentang pelatihan-pelatihan dan pendisiplinan pada karakter yang diinginkan oleh Islam. Sebagaimana diungkapkan Adian Husaini, kata yang cocok untuk mendeskripsikan pendidikan karakter saat ini adalah *ta'dib* yang dimaknai oleh Naquib al-Attas, bukan *tarbiyah* ataupun *ta'lim*³⁸⁶.

Setidaknya itulah definisi pendidikan Islam, yang pada intinya, adalah proses transfer ilmu pengetahuan dari seorang guru terhadap muridnya (*ta'lim*), pembimbingan hingga sampai kepada kematangan mental (*tarbiyah*), atau pelatihan atau pendisiplinan peserta didik melalui sistem pengejaran ilmu-ilmu keislaman (*ta'dib*).

³⁸⁶ Jonh Dewey, *Education and Democracy* (USA :The Pennsylvania State University, 2001), 105

Sedangkan pendidikan umum, sebagaimana dikembangkan oleh ilmuwan Barat, seperti John Dewey mendefinisikan pendidikan adalah sebuah proses transfer ilmu pengetahuan sehingga anak didik mampu mentransformasikan terhadap kehidupan sehari-sehari. Bagi Dewey tujuan pendidikan adalah pembentukan kesadaran peserta didik agar mampu menghadapi kehidupan. Kesadaran-kesadaran tersebut berawal dari kebutuhan manusia itu sendiri dan dalam membentuk peruses pembentukannya, seorang pendidik, mesti menggunakan metode-metode yang berkaitan dengan kehidupan secara langsung³⁸⁷. Bagi Paolo Pierre, pendidikan adalah sebuah upaya pembentukan kesadaran kritis terhadap makna kehidupan (*meaning of life*) bukan berbentuk indoktrinasi dan pengisian otak terhadap pengetahuan yang sulit mereka sadari³⁸⁸.

Menurut HAR Tilaar, fungsi terpenting dari pendidikan adalah transformasi nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai kebudayaan yang dimaksud, bukan hanya artifak produk kebudayaan, melainkan kebiasaan-kebiasaan luhur yang membentuk sebuah identitas suatu bangsa atau negara. Maka menurutnya, pendidikan, sebagaimana diamanatkan undang-undang 45, adalah mencerdaskan anak bangsa melalui ilmu pengetahuan dan berpedoman pada nilai-nilai kebudayaan³⁸⁹.

Dalam konteks pendefinisian di atas, tidak tampak ada perbedaan yang signifikan antara pendidikan Islam dan pendidikan modern, karena masih berkaitan dengan aspek ontologis. Yang pada hakikatnya, pendidikan Islam dan modern ingin membentuk sebuah kesadaran tertentu bagi peserta didik. Perbedaan, atau lebih tepatnya pembedaan, mulai tampak disaat pembahasan mengenai aspek epistemologis dan aksiologis.

Pada aspek epistemologis, pendidikan Islam, menurut sebagian kalangan, semestinya bersumber dari nilai-nilai kebudayaan dan peradaban Islam, tidak mencontoh atau bahkan mengambil pengetahuan dari peradaban lain. Sikap ini mayoritas didukung oleh para pemikir 'Islamisasi Ilmu Pengetahuan'³⁹⁰ semisal Isma'il raji al-Faruqi, Naquib al-Attas, dan lainnya. Al-Attas juga memaknai islamisasi sebagai suatu proses. Meskipun manusia mempunyai komponen jasmani dan rohani sekaligus, namun pembebasan itu lebih merujuk pada rohaninya. Sebab manusia yang demikian adalah manusia yang sejati yang semua tindakannya dilakukan dengan penuh kesadaran dan makna. Al-Attas menilai islamisasi sebagai proses pembebasan atau memerdekakan

³⁸⁷ *Ibid.* 106

³⁸⁸ Sebagaimana dikutip Listiyono Santoso, *Epistimologi Kiri* (Surabaya : Erlangga Press, 2008), 78

³⁸⁹ HAR. Tilaar, *Pendidikan dan Kekuasaan manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan* (Jakarta : Rinneka Cipta, 2009). 55

³⁹⁰ Islamisasi merupakan sebuah karakter dan identitas Islam sebagai pandangan hidup (*worldview*) yang di dalamnya terdapat pandangan integral terhadap konsep ilmu (*epistemology*) dan konsep Tuhan (*theology*). Bahkan bukan hanya itu, Islam adalah agama yang memiliki pandangan yang fundamental tentang Tuhan, kehidupan, manusia, alam semesta, dan banyak hal lainnya. Oleh sebab itu, Islam adalah agama sekaligus peradaban. Lihat Wan Mohd Nor Daud, *The Educational Philosophy and Practice of Syed M. Naquib Al-Attas* (Malaysia: ISTAC, 1998), 298.

sebab islamisasi melibatkan pembebasan roh manusia yang mempunyai pengaruh atas jasmaniahnya dan proses ini menimbulkan keharmonisan dan kedamaian dalam dirinya sesuai dengan fitrahnya (*original nature*).³⁹¹

Islamisasi ilmu berarti pembebasan ilmu dari penafsiran-penafsiran yang didasarkan pada ideologi sekular, dan dari makna-makna serta ungkapan manusia-manusia sekular. Dan dalam pandangan al-Attas setidaknya terdapat dua makna islamisasi yaitu islamisasi pikiran dari pengaruh eksternal dan kedua islamisasi pikiran dari dorongan internal. Yang pertama pembebasan pikiran dari pengaruh magis (*magical*), mitologis (*mythology*), animisme (*animism*), nasional-kultural (*national cultural tradition*), dan paham sekular (*secularism*). Sedangkan yang kedua adalah pembebasan jiwa manusia dari sikap tunduk kepada keperluan jasmaniah yang condong menganiaya diri sendiri. Sebab sifat jasmaniah manusia lebih condong untuk lalai terhadap fitrahnya sehingga mengganggu keharmonisan dan kedamaian dalam dirinya. Hal itu pada gilirannya menjadikan manusia abai terhadap tujuan asalnya. Jadi islamisasi bukanlah satu proses evolusi (*a process of evolution*) tetapi satu proses pengembalian kepada fitrah (*original nature*). Dengan demikian dalam konteks pendidikan Islam, yang perlu dilakukan adalah penghilangan sumber pelajaran yang berdasarkan pada pengaruh-pengaruh negara-negara sekular, yang bisa menghilangkan kesadaran umat Islam sebagai umat yang memiliki peradabannya sendiri (*main nature of Islamic civilization*).

Sedangkan dalam pandangan filosof Barat, kerangka epistemologi yang mereka bangun adalah berdasarkan pada pemikiran-pemikiran filosof terdahulu yang menciptakan konsep, cara pandang, dan ilmu pengetahuan sendiri. Para filosof pendidikan Barat, lebih menyandarkan konsep pendidikannya bukan pada nilai-nilai agama yang mereka anut, melainkan pada produk penelitian (baik *empiric* ataupun *rationalism*). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Claudia Ruitenberg, dalam bukunya, *what do philosopher of education do ?*, bahwa para filosof pendidikan Barat bertitik tumpu pada hasil *research* yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahkan dia mengutip ungkapan dari pandangan para filosof pendidikan yang menyebutkan :

‘Research’ has come to be employed in contemporary academic life as a generic term referring to forms of inquiry pursued in all the many disciplines, from the natural sciences to the humanities. In this broad sense of the term philosophers have been engaged in research throughout the entire history of philosophy, and continue to be so engaged today, together with their scientific and humanistic colleagues in the many other disciplines descended from philosophy in which the degree of Doctor of Philosophy is still granted”³⁹².

³⁹¹ *Ibid*, 44.

³⁹² Claudia Ruitenberg, *What do philosopher of education do?*(UK :Library congress, 2010), 3

Dari kutipan ini bisa disebutkan bahwa dalam mengembangkan konsep pendidikannya, para filosof pendidikan di Barat (baca : secular) lebih mengedepankan hasil-hasil penelitian yang dinamis dan tidak bertumpu pada produk-produk nilai-nilai keberagamaan. Jadi, pada kesimpulannya, perbedaan utama antara pendidikan Islam dan pendidikan modern, menurut sebagian kalangan, adalah berasal dari sumber pengetahuan (epistemology) dan karakter dalam proses pencarian ilmu pengetahuan.

Selain dari aspek epistemologis, perbedaan pandangan juga terjadi dari aspek tahap aksiologis (*nilai*). Di Barat, banyak beranggapan bahwa nilai-nilai universalisme yang terbangun dari peradaban mereka bukanlah berasal dari nilai-nilai keagamaan. Bahkan, negara-negara yang menganut sistem secular, mayoritas memiliki sejarah kelam (*the dark side*) terhadap pengalaman keberagamaannya. Misalnya, modernism yang timbul di Barat terlahir akibat banyaknya penyelewengan oleh para pastur Gereja, sehingga mereka melakukan revolusi dan tidak lagi menghormati kedaulatan agama (pastur). Melihat sejarah ini pula, maka mengkompromikan pendidikan dengan nilai-nilai keberagamaan merupakan hal yang cukup mustahil dilaksanakan.

Berbeda dengan Islam dan umatnya, dalam runtutan kesejarahannya peradaban Islam terdonktrinasi dengan kondisi *sacred quality* (nilai suci). Oleh karena, usulan bahwa nilai-nilai keberagamaan sebagai nilai atau tujuan dari pendidikan merupakan hal yang wajar. Pada intinya, pendidikan Islam secara aksiologis masih terbangun dari tujuan-tujuan Islam mulia, yakni sebagai manusia sempurna (insane kamil). Artinya, manusia yang memiliki kemampuan intelektual yang baik, begitu juga memiliki akhlak (*etika*) yang baik pula.

Jadi, pada kesimpulannya, terminology pendidikan Islam dan modern tidaklah terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut dibentuk oleh sebagian kalangan pemikir Islam yang berupaya untuk mengembalikan kedigdayaan peradaban Islam. Sebagaimana thesa yang sempat diungkapkan oleh S. Huttington, bahwa pada saat ini, ada dua *clash* peradaban yakni antara Islam dan Barat. Tak pelak, klaim kebenaran antara satu sama lain, terkadang membawa mereka pada egocentrisme belaka.

B. Anthropological approach to Islamic Education concept

Di atas sudah dijelaskan pendidikan Islam dari segi kajian keilmiahan, mulai dari aspek ontologis (hakikat), epistemologis, dan aksiologis. Selanjutnya, pendidikan Islam dikaji dari segi antropologis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai produk pemikiran dan konsep pendidikan Islam, bukan hanya pada konsep ilustrasional dalam kajian akademik. Kajian antropologi disini akan mengambil beberapa sampel konsep pendidikan di beberapa negara yang menganut sistem politik yang berbeda; antara Islamisme dan sekularisme.

Dalam studi agama, kajian antropologis, berarti menganggap bahwa ‘fakta atau data’ yang ada sebagai sebuah produk dialektika pemikiran manusia akan interpretasi sebuah ajaran. Masdar Hilmy dan Akh. Muzakki juga mengungkapkan bahwa : “*concern* antropologi dalam kajian agama adalah Islam yang mengejewantah dan masyarakat yang mengambil Islam sebagai agama, yakni sebagai dasar bagi ekspresi keseharian mereka. Ekspresi keagamaan ini kemudian menyatu dalam kebudayaan secara keseluruhan...Jadi, antropologi membahas kenyataan yang ada dan berlaku dalam masyarakat suatu agama (*what is*), dan bukan bagaimana seharusnya agama itu berperilaku (*what ought to be*)³⁹³”. Sebuah kebudayaan masyarakat bisa dilihat dengan melalui antropologi. Rosalind I. J. Hacklett menyebutkan bahwa :

Anthropology enjoys an ongoing dialectical tension between its scientific and humanistic sides. This is well characterized by James Peacock in his valuable introductory text on the anthropological enterprise: ‘Emphasis on culture and recognition of the subjective aspect of interpretation link anthropology to the humanities, yet its striving for systematization, generalization, and precise observation reflects the inspiration of the sciences’... French sociologist Émile Durkheim saw religious beliefs and concepts as the product of particular sosial conditions, rather than in intellectualist terms³⁹⁴.

Dalam kajian Pendidikan Islam, secara antropologis, bisa dimaknai sebagai lembaga pendidikan yang terbentuk oleh manifestasi ajaran-ajaran Islami, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Menurut Solon T. Kinbal, antropologi pendidikan memiliki kajian yang sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan kondisi psikologi peserta didik, kompetensi, dan aspek-aspek lainnya, melainkan juga berkaitan dengan aspek kebudayaan (*cultural aspect*), data mengenai kecenderungan masyarakat, sejarah dan sistem politik yang dapat mempengaruhi sistem pendidikan³⁹⁵.

Menurutnya, seorang antropolog pendidikan, seyogyanya bisa menggambarkan *cross-cultural examination* yang terjadi di masyarakat serta menjelaskan pula pengaruhnya terhadap dunia pendidikan yang ada di wilayah lembaga pendidikan tersebut³⁹⁶. HAR. Tilaar, antropologi merupakan disiplin ilmu yang mampu mengkategorikan *shifting paradigm* akibat anomali-anomali yang terjadi di dalam sebuah kemasyarakatan³⁹⁷. Senada dengan Tilaar, Koentjaraningrat mengungkapkan bahwa antropologi pada awalnya merupakan disiplin ilmu untuk menalisa kebudayaan primitive (*primitive culture*) yang berubah diakibatkan oleh pendidikan dan pemahaman

³⁹³ Masdar Hilmi dan Akh. Muzaki, *Dinamika baru Studi Islam* (Surabaya : Arkola, 2005), 160

³⁹⁴ Rosalind I. J. Hackett “Anthropology of religion” dalam *The Routledge Companion to the Study of Religion* Edited by John R. Hinnells. (London : Rutledge, 2005), 145

³⁹⁵ Solonn T Kinball, *Anthropology and education* (New York : tp, 1956), 481

³⁹⁶ *Ibid*, 482

³⁹⁷ HAR. Tilaar, *Pendidikan dan Kekuasaan manajemen pendidikan nasional dalam pusaran kekuasaan..* 55

baru. Namun, setelah pergeseran kebudayaan yang begitu cepat, antropologi mengalami perkembangan yang juga signifikan, dan masuk dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, budaya bahkan pendidikan³⁹⁸.

Jadi, secara antropologis, pendidikan Islam sudah mengalami beberapa perubahan-perubahan bentuk akibat dari manifestasi pemikiran manusia dan globalisasi. Pendidikan Islam antara negara yang satu dengan negara lainnya pastilah memiliki sistem yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan kemasyarakatan yang diinginkan. Menurut Azzumardi Azra, dia menyebutkan bahwa :

“Pendidikan Islam jelas tidak seragam di berbagai kawasan dunia tersebut; dan sejarah pembaruan dalam pendidikan Islam sangatlah panjang. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam di berbagai kawasan dunia Muslim mengalami pembaruan jauh sebelum terjadinya ketegangan antara Barat dan dunia Muslim. Tujuan pembaruan tidak lain agar membuat peserta didik dan lulusan pendidikan Islam dapat memiliki pandangan dunia keislaman yang kuat dan pada saat yang sama siap menghadapi tantangan dunia modern dengan ilmu dan keahlian³⁹⁹.

Menurutnya, di beberapa negara Timur Tengah, semenjak tahun 1960-an sistem pendidikan formal berada di bawah naungan kekuasaan negara. Semua lembaga pendidikannya tidak ada yang secara spesifik dikategorikan berlabel pendidikan Islam, terkecuali disebut sebagai sekolah nasional. Meskipun ada, pendidikan Islam, bentuk yang tampil ke permukaan adalah dengan model ‘*kuttab*’ yang menjadi tempat anak belajar al-Qur’an. Berbeda halnya dengan yang ada di Pakistan dan Afganistan, pendidikan Islam-khususnya madrasah-tetap berada di luar sistem pendidikan nasional dengan ideologi dan kurikulumnya sendiri. Usaha negara mereformasi madrasah tidak pernah berhasil, sehingga ia tetap sepenuhnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama sesuai ideologi para pemilik dan pengasuhnya. Karena itulah, madrasah semacam ini sangat rentan menjadi tempat bagi sektarianisme keagamaan yang kian sulit terselesaikan⁴⁰⁰.

Di Pakistan, keberadaan madrasah sangatlah mendominasi sistem pendidikan Islam. Ada banyak model madrasah, baik itu berbasis pada aliran-aliran tertentu seperti syi’ah, ahulul hadits, dan beberapa aliran lainnya. Hingga pada tahun 2001, sebagaimana dijelaskan oleh Mumtaz Ahmad, perkembangan pendidikan Islam dengan sistem madrasah ini sangat berkembang pesat. Maklum, Pakistan merupakan negara

³⁹⁸ *Ibid*, 56

³⁹⁹ Azzumardi Azra, *pembaharuan pendidikan Islam* (tulisan dimuat di Harian Republika 21 April 2011),

⁴⁰⁰ *Ibid*.

dengan label atau kenegaraan Islam serta memberlakukan hukum Islam sebagai aturan kenegaraannya⁴⁰¹.

Cristine Fair menyebutkan bahwa ada lima model madrasah yang beravilisiasi dengan kelompok keberagamaan tertentu. Tiga sekolah model kelompok sunni (*nizamiyah*), satu model yang beravilisiasi dengan kelompok Syi'ah, dan satu lagi yang tergabung dalam organisasi Jema'ah Islamiyah (JI)⁴⁰². Secara konseptual, A. K Brohi, seorang professor dari Pakistan, menyebutkan bahwa Pakistan sebagai negara yang meyakini bahwa Islam sebagai sistem pemerintahannya, seharusnya pula membentuk pendidikan yang tidak berlandaskan pada sistem atau *cult* kebebasan yang ada di Barat. Karena Islam sendiri sudah memperkenalkan sistem yang sangat elegan untuk diterapkan di dalam dunia pendidikan⁴⁰³.

Meski sesama negara yang berlandaskan pada asas dan konsitusi Islami, rupanya pendidikan Islam di Iran mulai berjalan pasca era post-revolution. Sebagaimana yang disebutkan oleh Toyoko Morita, bahwa "islamisasi ilmu pengetahuan" menjadi rule model pendidikan Islam di Iran, termasuk didalam di dalam sistem pendidikan nasionalnya. Setidaknya dia menyebutkan dalam tulisannya "*Postrevolution education is characterized by a close relationship between education and Islam, not just in religious but also public schools, which significantly influences how human rights are taught in schools. Postrevolution education is not a continuation of traditional Islamic education methods or a return to tradition. Modern, Westernized methods, which replaced traditional Islamic education, were Islamicized after the revolution*"⁴⁰⁴.

Hadi Sharifi menyebutkan bahwa ada kecenderungan dalam pendidikan modern membentuk kebingungan atau mengalinisiasi umat Islam terhadap pemahaman yang benar tentang Islam. Mayoritas umat muslim kehilangan makna yang benar dan signifikan tentang Islam. Oleh sebab itu, sebagai sebuah negara yang dibangun di atas perjuangan umat Islam, maka wajib hukumnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan kultur Islam, bukan sistem pendidikan yang mencontoh pemahaman modernism Barat⁴⁰⁵. Jadi, pada kesimpulannya, dari dua negara di atas, baik Pakistan maupun Iran, konsep pendidikannya didasarkan pada ideology negaranya yang berdasarkan agama Islam. Sistem pendidikan tersebut dibangun di atas terminology bernama 'Islamisasi Ilmu' pengetahuan. Sebuah upaya yang dilakukan oleh

⁴⁰¹ Mumtaz Ahmad, *Madrasah education in Pakistan and Bangladesh* (paper of radicalism and security of south Asia), hal 5-10

⁴⁰² C. Cristine Fair, *Islamic education in Pakistan* (Report of United State Institute of Peace, 2006), 1

⁴⁰³ A. K. Brochi, Education in ideological State, dalam Naquib al Attas, *Aim and objective of Islamic Education...* 63

⁴⁰⁴ Toyoko Morita, *Islamic, Education, and Human Righth in Iran* dalam buku Human Righth in Asian School, 75

⁴⁰⁵ Hadi Sarifi, The Islamic as Opposed to Modern Philosophy of Education dalam Naquib al Attas, *Aims and Objectives of Islamic Education*, 79

para pemikir pendidikan Islam agar konsepnya terbedakan dari pendidikan modern, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam konsep pendidikan secara umum.

Jikalau di negara yang berlandaskan sistem negara Islam, pendidikan Islam mulai berusaha memisahkan antara ilmu pengetahuan umum atau modern dengan ilmu pengetahuan Islam, kondisi berbeda ditunjukkan pendidikan Islam di negara-negara secular. Di negara-negara yang memisahkan kepentingan agama dan negara belum dapat mengakui ijazah yang ada dikeluarkan oleh pendidikan Islam. Hal ini diungkapkan oleh Azzumardi Azra dengan mengatakan :

” ...pendidikan Islam yang terus tumbuh di banyak negara Barat sejak di Eropa dan Amerika Utara berjuang untuk mendapat pengakuan negara sehingga para lulusannya dapat melanjutkan mobilitas pendidikan mereka. Untuk itu, mereka harus mengadopsi kurikulum dan standar pendidikan negara Barat setempat. Jika memenuhi syarat, lembaga pendidikan Islam tersebut bisa mendapat biaya sepenuhnya atau setidaknya subsidi dari pemerintah bersangkutan seperti berlaku di Inggris dan Belanda⁴⁰⁶.

Meskipun sebagai sebuah negara yang memisahkan agama dan negara. Negara-negara secular masih memberikan ruang bagi warganya yang memiliki keyakinan berbeda melalui sebuah payung undang-undang multikulturalisme dan kebebasan berkeyakinan (*freedom of faith*). Dari undang-undang tersebut, hak asasi warganya terjaga dengan baik. Sebagaimana dikutip James A Bank, dia menyebutkan bahwa “..multiculturalism is a distinctive philosophy that legitimizes demands upon unity and diversity, seeks to achieve political unity without cultural uniformity, and cultivates among its citizens both a common sense of belonging and a willingness to respect and cherish deep cultural differences”⁴⁰⁷. Jadi, pada intinya perkembangan pendidikan Islam di negara-negara sekuler harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di negara Sekular, meskipun tidak ada larangan untuk mendirikan pendidikan Islam.

Setidaknya, inilah gambaran eksistensi pendidikan Islam di negara Islam maupun negara sekuler. Pada kesimpulannya, pendidikan Islam memang mesti menyesuaikan dengan kepenetinan nasional dan umat Islam pada umumnya. Pendidikan Islam tidak bisa hanya berlandaskan pada nilai-nilai normative sejarah dan teks suci saja, melainkan membutuhkan adanya kontekstualisasi sistem atau bahkan modernisasi agar mampu menyesuaikan dengan tuntutan zaman.

⁴⁰⁶ Azzumardi Azra, *Pembaharuan pendidikan Islam*, 3

⁴⁰⁷ James A. Banks, *Multicultural education: Theory and practice* (Oxford University Press : London, 1994), 23

Futurology of Islamic Education in Indonesia

Istilah futurologi lebih banyak dikenal dalam terma teknologi pendidikan. Futurologi, secara etimologi mempunyai dua kandungan kata. *Pertama* adalah *future* berarti masa depan. *Logos* adalah bahasa kedua yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, futurologi adalah ilmu tentang masa depan melalui intervensi ilmu dan teori-teori untuk menprediksinya. Meskipun istilah ini asing. Sebenarnya, sudah banyak karya-karya yang memprediksi format pendidikan masa depan. Misalnya, pendidikan holistik, integratif, multikultural, inklusif dan prospektif.

Menurut Wibowo, futurology seringkali disamakan dengan riset masa depan, studi masa depan, riset kebijakan, *futurism*, dan lain sebagainya. Yang pada prinsipnya, futurology kajian tentang kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik)⁴⁰⁸. Pendidikan Islam masa depan. Itulah yang akan menjadi *content* pembahasan tulisan ini. Sebenarnya, sudah ada banyak tawaran format pendidikan Islam masa depan. Terminologinya pun berbeda-beda. Salah satunya adalah pendidikan integratif. Pendidikan Intergratif adalah langkah kedepan untuk menghilangkan dikotomi Pendidikan Islam. Sebagai produk pendidikan masa depan. Pendidikan integratif dilatarbelakangi oleh permasalahan dualisme pendidikan, baik secara keilmuan dan kelembagaan. Dari segi keilmuan ada kegelisahan ilmuan muslim, terhadap sistem pendidikan Islam yang bernuansa Barat. Kurikulum yang digunakan adalah produk kajian Islam-Barat, bukan langsung dari hasil karya umat Islam. Dengungan ini, banyak diungkapkan kelompok anti-Barat, contohnya, Hartono Ahmad Jaiz, Naquib al-Attas, dan lain sebagainya. Dilain pihak, terdapat sosok Mukti Ali, Azzumardi Azra, dan beberapa intelektual muslim modernis lainnya, yang beranggapan pendidikan Islam kontekstualisasi dengan kebutuhan zaman. Menurut mereka, perlu diakui bahwa basis-metodologi Barat lebih dapat dipertanggung jawabkan (*measuremental*) dibandingkan mengandalkan kajian-kajian klasik yang dimiliki oleh umat Islam. Oleh sebab itulah, pendidikan integratif, bertujuan untuk menegasikan dualisme dengan mencari nilai-nilai kesamaan bukan perbedaan.

Tawaran futurologi adalah pendidikan Islam *humanis-relegius*. Tawaran ini dilandasi dari anggapan bahwa pendidikan Islam jauh dari humanis (memanusiakan manusia), di sisi lain, pendidikan Islam mempunyai sikap keagamaan yang kuat, moralitas mereka lebih beradab dibandingkan sekolah-sekolah umum lainnya. Pendidikan Islam tidak humanis karena memaksakan hafalan, melegalkan pemukulan, dan pendisiplinan yang dipaksakan. Contoh dari tindakan ini, banyak terlihat di pondok pesantren atau madrasah di pondok pesantren, dimana santri harus menghafalkan nadzam, tahlil, dan lainnya. Di sisi lain, sekolah umum yang lebih longgor mempunyai

⁴⁰⁸ Udik Budi Widodo, *futurology sebagai perangkat perencanaan pendidikan* dalam Jurnal Manajemen pendidikan No.02/Th III/Oktobre/2007. ISSN: 1978-1938. 4

kelemahan sikap keagamaan (*relegiuisitas*). Moralitas mereka jauh dari baik dan shaleh layaknya pondok pesantren. Oleh karenanya pendidikan humanis-religius ditawarkan. Tawaran hampir mirip dengan ini adalah pendidikan yang mengintegrasikan sikap rasionalitas dan spritualitas. Sebagaimana yang ditawarkan oleh Abdurrahman Mas'ud⁴⁰⁹.

Itulah beberapa bentuk tawaran ilmiah yang dapat dilaksanakan sebagai konsep pendidikan Islam masa depan. Namun, menurut penulis, diskursus (wacana) tetap saja berwujud diskursus, tidak akan berfungsi apa-apa. Berbeda kalau seandainya semua diskursus tersebut diakui sebagai karya kebudayaan secara luas. Seyogyanya, yang perlu diintegrasikan adalah integrasi nilai-nilai kebudayaan (*cultural integrated*). Pasalnya, kebudayaan adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya.

Kontjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan, bagi seorang antropolog, adalah “keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar”⁴¹⁰. Dari sebuah gagasan tersebut kemudian menjadi sistem sosial, sistem ekonomi, termasuk sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut Tilaar menyatakan ada tujuh kandungan modal kebudayaan dengan arti yang luas : *Pertama* Modal alam atau lingkungan yang akan dioleh oleh manusia sebagai pemiliknya, *Kedua*, Modal keuangan suatu negara. *Ketiga* Modal fisik yang dimiliki oleh manusia. *Keempat* Modal kelembagaan seperti pemerintahan *Kelima* Modal pengetahuan seperti halnya lembaga pendidikan *Keenam*, Modal manusia yang memiliki wawasan. *Ketujuh*, Modal dalam bidang bahasa⁴¹¹.

Tawaran integrasi tidak hanya satu sisi nilai integrasi individu (*rasionalitas-spritual, humanitas-relegiuisitas dan lain sebagainya*). Integrasi yang mesti dilakukan harus multi-dimensi keseluruhan kebudayaan manusia dan berkaitan pada modal-modal kebudayaan manusia. Yang mestinya diintegrasikan adalah tiga wujud kebudayaan. Wujud pertama adalah kebudayaan sebagai suatu kompleksifitas idea-idea, gagasan-gagasan, nilai-nilai, aturan dan lain sebagainya. Wujud kedua adalah kompleksifitas aktivitas tindakan dan tindakan yang berpola dalam masyarakat. Wujud terakhir adalah

⁴⁰⁹ Abdurrahman Mas'ud *Menggagas Format Pendidikan non-dikotomik: Humanisme relegius sebagai paradigma pendidikan Islam* (Jogjakarta : Gama Media, 2002).

⁴¹⁰ Kontjaraningrat, *Pengantar Ilmu antropologi* (Jakarta : Rinneka Cipta, 2002), 180

⁴¹¹ HAR. Tilaar, *Pendidikan dan Kekuasaan manajemen pendidikan nasiona dalam pusaran kekuasaan...*58

benda-benda hasil karya manusia⁴¹². Semua wujud itulah yang seyognya diintegrasikan sebagai solusi dari problematika pendidikan Islam. Setidaknya ada tiga *keyword* integrasi yang dapat disimpulkan. *Pertama* Idea Pendidikan Islam, *Kedua*, Tindakan masyarakat dalam pendidikan Islam. *Ketiga* Produk kebudayaan pendidikan Islam.

Pada sisi integrasi idea-idea pendidikan Islam, sebenarnya, sudah banyak pola integrasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah integrasi kurikulum antara pendidikan umum dan pendidikan agama, atau integrasi dualisme ontologi manusia antara sifat rasional dan spritual. Tentunya, semua poros integrasi ini hanya berkaitan dengan idea-idea, gagasan, pemikiran sebagai sebuah diskursus, dan tidak akan menampilkan tindakan-tindakan dalam wujud sistem sosial. Bahkan terkadang antara kerangka gagasan dengan realistanya tidak dapat ditemukan.

Integrasi pendidikan Islam melalui sistem “tindakan pembudayaan” bisa dilaksanakan tanpa mereduksi keyakinan masyarakat terhadap suatu kebenaran. Salah satu contohnya adalah dengan mendidik agen kebudayaan (*agent of culture*) dengan sikap modal moralitas yang baik, tanpa menyalahkan sistem keyakinan yang mereka miliki. KH. Hasyim Muzadi menyatakan bahwa kenapa mesti ide-ide keilmuan yang mesti diislamkan, bukannya lebih mudah dan realistis kalau seandainya orangnya yang diislamkan. Dengan artian, para ilmuwan didik melalui etika-etika, dan tanggung jawab berdasarkan keislaman. Beliau mendirikan Pondok Pesantren di dekat UI, tujuannya untuk membudayakan tindakan Islam sesuai dengan kebudayaan Islam Indonesia, bukan mengislamkan gagasan-gagasan ilmu pengetahuan yang mereka miliki di Universitasnya.

Terakhir adalah integrasi “produk kebudayaan pendidikan Islam Indonesia”. Pesantren adalah produk kebudayaan Indoensia asli. Sistem kebudayaan Pesantren adalah pemondokan (*college*). Dan inilah yang seyogyanya diintegrasikan di dalam madrasah, dan perguruan tinggi. Alasannya, melalui sistem yang demikian, pendidikan akan masuk menjadi sistem kebudayaan, pembiasaan mereka akan merangi kehidupan dibawah sadar mereka. Produk dari sistem pendidikan ini bukanlah *educated people* melainkan *civilized people*. Pembudayaan membutuhkan waktu lama, sedangkan jam belajar di sekolah cukup sebentar. Inilah yang dikembangkan oleh Thomas Jefferson dengan konsep “*feodalisme intelektual*”. Sang Bapak demokrasi modern ini menganggap bahwa setiap orang memiliki kemampuan, keinginan dan bakat yang berbeda-beda. Semuanya akan teratasi apabila ada yang memimpin secara konfehensif. Feodalisme intelektual mempunyai makna bahwa orang-orang yang berbakatlah yang akan memimpin kelompok-kelompok masyarakatnya menuju satu kesuksesan⁴¹³. Di pesantren, setiap kelompok masyarakat pasti ada *musyrif*, *ustadz* dan minimalnya punya ketua kamar yang dihuni oleh orang yang lebih senior.

⁴¹² Koentjaraningrat. *Pengantar ilmu antropologi...* 186

⁴¹³ Di kutip dari HAR Tilaar *Pendidikan dan kekuasaan...* 234

“Manusia yang utuh adalah manusia yang kebudayaan”. Oleh karena itu, manusia adalah aget dari dirinya sendiri yang mencipta kebudayaannya sendiri. Manusia harus memahami nilai-nilai kebudayaannya sendiri, sebagai wujud dari kepribadiannya. Asimilasi kebudayaan Islam dan Barat, hanya bagian untuk menjadi manusia yang utuh. Beberapa budaya sudah memberikan penjelasan yang demikian rupa tentang kebudayaan asli Indonesia. Itulah yang seyogyanya menjaadi lapisan awal dari kebudayaan kita. Bukan orang lain, atau internalisasi informasi yang dapat menghilangkan eksistensi, identitas dan entitas kebudayaan Indonesia.

EPILOG

‘Apa yang dibahas panjang dan lebar di atas, adalah hasil dari kerangka kebudayaan manusia. Karya, karsa dan cipta yang akan memberikan kesan berbeda-beda bagi pengkaji kebudayaan. Untuk mengubah *nature* menjadi kebudayaan pastinya melalui proses pendidikan. Para pemikir pendidikan Islam yang *concern* untuk mempertahankan nilai-nilai Islam, kemudian menolak kebudayaan barat, dikarenakan pendidikan dan keyakinan mereka tentang sebuah sistem kebudayaan. Begitu halnya, dengan para filosof pendidikan yang adaptip dengan modernisme dan kemajuan zaman, seperti Syed Ahmad Khan, Azzumardy Azra dan lain, juga meciptakan produk-produk intelektualitas berdasarkan pedidikan dan kebudayaan yang ia selami.

Oleh sebab itu, andai saja agama bisa dikatakan sebagai produk kebudayaan atau perilaku-perilaku keberagamaan dihasilkan oleh produk kebudayaan. Kenapa pendidikan Islam tidak bisa dianggap sebagai produk kebudayaan yang bisa bertentangan seperti yang bisa disebutkan oleh Samuel Huntington. Antropologi Pendidikan Islam mungkin sangat jarang ditemukan menjadi kajian tersendiri. Sejarah sosiologi pendidikan Islam *include* dalam sejarah peradaban Islam. Lagi-lagi, kajian antropologi pendidikan lebih terlihat di Barat. Sepeti halnya, yang banyak dikutip oleh Tilaar dalam buku-bukunya.

Indonesia, dalam sistem pendidikan Islamnya, sudah memberikan produknya yakni dengan pesantren, atau taman siswa oleh Ki Hadjar Dewantara. Dua sistem pendidikan ini, bukan semata-mata mengajarkan ilmu, melainkan mendisiplinkan tindakan-tindakan. Itulah yang mereka sebut sebagai pembudayaan. Sebuah pelajaran yang masuk dibawah alam sadar manusia, dan menjadi karakter setelah mereka keluar. Sistem pesantren memang sulit untuk dievaluasi layaknya pendidikan umum, namun outputnya bisa dilihat dengan perbedaan yang jelas. Orang pesantren tidak pernah dianggap asing oleh masyarakat, karena modal mereka adalah budaya masyarakat. Sedangkan, kelompok intelektualis (di kampus, atau madrasah), akan merasa diasingkan, karena jauh teori dari praktek lapangan. Di pesantren mereka dimodali apa

yang masyarakat butuhkan, khususnya keagamaan. Di kampus, mereka dimodali ilmu, yang terkadang lapangannya tidak dibutuhkan masyarakat.